



NURCHOLISH MADJID
MEMORIAL LECTURE VII

Sisi Gelap Reformasi di Indonesia: Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran*

Sidney Jones**

Nurcholish Madjid bekerja sepanjang hidupnya untuk mempromosikan kerukunan beragama. Beliau memandang Islam sebagai agama terbuka untuk perubahan dan pembaharuan melalui pendekatan yang inklusif di mana kesamaan antara agama dipandang lebih penting daripada perbedaan. Ketika saya melihat perdebatan-perdebatan yang terjadi hari ini, saya menyadari betapa kita kekurangan orang seperti Cak Nur atau Gus Dur yang memperjuangkan toleransi dengan komitmen yang dalam. Tapi saya pikir kita semua harus berterima kasih kepada Paramadina yang aktif melakukan penelitian serta menyediakan tempat untuk diskusi untuk menghormati warisan Cak Nur dan menjaga gagasan Islam yang inklusif bisa tetap hidup diantara kita.

* Disampaikan sebagai Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML) di Aula Nurcholish Madjid, Kampus Universitas Paramadina, Jakarta, 19 Desember 2013.

** Sidney Jones adalah Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) yang berbasis di Jakarta. Sebelumnya, dari 2002 hingga Juli 2013, dia bekerja pada International Crisis Group (ICG), pertama sebagai direktur proyek Asia Tenggara, lalu, sejak 2007, sebagai penasihat senior untuk program Asia. Dia memperoleh B.A. dan M.A. dari University of Pennsylvania, Amerika Serikat, dan doktor kehormatan dari New School for Social Research di New York pada 2006.

Ide untuk kuliah ini datang dalam perjalanan penelitian saya tentang terorisme, ketika saya mulai menemukan lebih banyak kasus para pemuda yang awalnya aktif terlibat dalam kampanye anti-maksiat kemudian beralih ke bentuk yang lebih ekstrem, yaitu aksi-aksi kekerasan. Mereka memulainya dengan menggunakan tongkat dan batu atas nama menjaga moralitas umat serta menjaga Islam dari hal-hal yang dianggap menyimpang, namun belakangan mereka mencoba menggunakan bom.

Contohnya apa yang terjadi di Cirebon, di mana sebagian orang yang membantu merencanakan pemboman Masjid adz-Dzikir awalnya adalah anggota dari dua kelompok masyarakat madani garis-keras terkemuka: Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) dan Gerakan Anti Pemurtadan & Aliran Sesat (GAPAS). Keduanya dipimpin seorang ulama yang juga pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) setempat dan mengajar di STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Cirebon. Kedua kelompok ini bertanggungjawab atas serangkaian aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas dan tempat-tempat maksiat. Mereka menutup sebuah stasiun televisi Kristen pada tahun 2008, menutup secara paksa beberapa balai pertemuan Protestan, bekerja sama dengan polisi untuk melarang sekte “Surga Eden” pada awal 2010, menyerang kampung Ahmadiyah di Manis Lor, dan kemudian – pada tahun yang sama – serangkaian serangan terhadap karaoke serta supermarket yang menjual bir.³

Bagi saya, yang mengejutkan tak hanya soal menyeberangnya beberapa anggota GAPAS atau FUI ke kelompok teroris, tetapi juga bahwa kegiatan anti-minoritas mereka telah dipromosikan oleh seorang dosen di lembaga pendidikan negara, dan dalam beberapa kasus serangan anti-maksiat mereka bisa bekerjasama dengan polisi setempat. Kita sulit mengerti perkembangan masyarakat madani (*civil society*) yang intoleran tanpa memahami dukungan aktif terhadap organisasi-organisasi ini dari orang-orang yang berkuasa.

Malam ini saya ingin mengeksplorasi berbagai tantangan bagi Indonesia yang datang dari masyarakat madani macam ini. Bagaimana masyarakat demokratis mengatasi kelompok yang secara fundamental sangat anti-demokrasi? Banyak negara demokrasi di Barat mengandalkan UU anti-penyebaran kebencian serta meningkatkan hukuman untuk kejahatan yang dimotivasi oleh kebencian atas agama serta ras tertentu, sambil mengakui bahwa demokrasi harus menyediakan ruang bagi organisasi yang mempromosikan pandangan eksklusif.

³ International Crisis Group, “Indonesia: From Vigilantism to Terrorism in Cirebon,” Asia Briefing No. 132, 12 January 2012.

Di Indonesia, masalahnya jauh lebih kompleks, tapi solusinya setidaknya harus dimulai dari penolakan kekerasan. Pemimpin di tingkat nasional hingga lokal harus berkomitmen menegakkan hukum terhadap berbagai aksi penghasutan, vandalisme serta penyerangan. Mereka juga perlu memastikan bahwa yang berada di sekitarnya – para menteri, kepala dinas, penasihat dan staf – juga punya komitmen yang sama. Tak ada gunanya bagi Presiden untuk meminta warga agar menghormati keragaman ketika beberapa menterinya sendiri mengirim pesan yang sebaliknya.

Masyarakat Madani

Salah satu keindahan dari demokrasi adalah bahwa ada ruang untuk kelompok yang kita tidak setuju, bahkan kelompok-kelompok yang kita anggap menghina. Ketika saya bekerja di Human Rights Watch pada 1989, direktornya adalah orang Yahudi yang keluarganya melarikan diri dari kejaran Nazi pada tahun 1939. Dia sering mengatakan, salah satu momen yang paling membanggakannya sebagai aktivis hak asasi manusia adalah pada tahun 1977, ketika dia jadi direktur American Civil Liberties Union (ACLU) dan membela hak kelompok neo-Nazi untuk melakukan pawai di sebuah kota bernama Skokie, yang penduduknya mayoritas Yahudi, termasuk yang pernah ditahan di penjara maut Nazi. Akibat pembelaannya itu, 30.000 anggota ACLU mengundurkan diri karena tidak setuju dengan keputusan tersebut. Tapi dalam pandangan direktur tadi, walaupun pawai itu memang mengerikan, tapi hak kebebasan berekspresi dan berkumpul tetap lebih penting.

Cerita di atas berbeda jauh dengan keadaan di Indonesia sekarang. Bukan saja soal membela hak berekspresi atau hak berkumpul, tapi juga penggunaan kekerasan. Banyak kelompok seperti GAPAS, FUUI atau FPI secara rutin menggunakan kekerasan dan intimidasi sebagai taktik advokasi. Kegiatan mereka menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakat madani di Indonesia saat ini tidak membantu mengkonsolidasikan demokrasi, seperti diharapkan dari kelompok-kelompok seperti itu, tetapi justru secara aktif memperlemahkan nilai-nilai demokratis.

Apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? Definisi mengenaiya telah berkembang dari waktu ke waktu. Pada 1994, ilmuwan politik Larry Diamond mendefinisikan masyarakat madani sebagai warganegara yang bertindak secara kolektif dengan cara yang bersifat sukarela, otonom dari negara dan terikat oleh tatanan hukum atau seperangkat aturan bersama.⁴ Mereka bisa

⁴ Lihat Larry Diamond, "Toward Democratic Consolidation," *Journal of Democracy*, Vol. 5, No. 3 (1994), hal. 5.

mengambil berbagai bentuk, termasuk organisasi komersial seperti kamar dagang, kelompok profesional, kelompok LSM, kelompok pendidikan, dan lain sebagainya. Mereka juga dapat mencakup kelompok agama yang bertujuan untuk mempertahankan identitas kolektif atau mempertahankan keyakinan mereka.

Diamond melihat kelompok ini punya peran penting membatasi peran negara dengan mencari perubahan kebijakan atau menuntut akuntabilitas. Tapi dia juga melihat mereka sebagai pendukung pluralisme, sehingga dia mengeluarkan berbagai kelompok fundamentalis serta kelompok lain “yang berusaha untuk memonopoli ruang fungsional atau ruang politik dalam masyarakat, mengklaim jalan mereka sebagai satu-satunya jalan yang sah.”⁵

Tetapi banyak ilmuwan punya pandangan berbeda, terutama mengingat munculnya beberapa kelompok pasca-Komunis di Eropa Tengah dan Timur, dengan mengakui bahwa kita sulit memahami *civil society* bila kita mengabaikan kelompok-kelompok yang sebenarnya punya tujuan kurang konstruktif.⁶ Misalnya jika kita berbicara tentang Eropa Tengah, kita harus menyertakan kelompok Skinhead (berkepala plontos) dan kelompok-kelompok lain yang berniat membersihkan negaranya dari etnis tertentu. Jika kita berbicara tentang AS, kita harus menyertakan kelompok-kelompok anti-imigran dan rasis.

Di Indonesia, kita tidak bisa bicara masyarakat madani tanpa memasukkan kelompok-kelompok Islam yang mendukung formalisasi syariat Islam dan berniat menggantikan sistem demokrasi dengan pemerintahan Islam. Tujuannya bisa sangat sempit dan diskriminatif; doktrinnya bisa eksklusif, dan untuk beberapa, taktiknya bisa termasuk penggunaan kekerasan. Kunci untuk mempertimbangkan kelompok-kelompok ini sebagai masyarakat madani adalah apakah mereka melihat diri mereka sebagai jembatan antara warganegara dan negara, dan sebagian besar memang begitu.

Thomas Carothers juga menggarisbawahi bahwa tidak benar pernyataan yang menyatakan bahwa makin aktif masyarakat madani di satu negara, makin kuat demokrasinya. Dia mengutip sebuah studi tentang periode Weimar di Jerman, yang menunjukkan bagaimana jaringan masyarakat madani di sana, pada tahun 1920 dan 1930-an, bisa disusupi dan

⁵ *Ibid.*, hal. 7.

⁶ Thomas Carothers, “Civil Society: Think Again,” *Foreign Policy*, Winter 1999-2000.

dimanfaatkan oleh Partai Nazi, sehingga akhirnya masyarakat madani tidak melindungi sistem demokratis tapi akhirnya menghancurkannya.⁷

Kita jangan salah mengambil pelajaran di sini. Orang Indonesia benar bangga dengan demokrasi mereka, dan berbagai survei yang menunjukkan meningkatnya intoleransi agama dalam masyarakat juga menunjukkan dukungan yang luas bagi sistem demokrasi. Tapi saya pikir kita perlu untuk mengeksplorasi mengapa Indonesia menjadi lahan subur bagi tumbuhnya berbagai organisasi yang dalam berbagai aspek kegiatannya bersifat anti-demokrasi.

Mari kita sekarang beralih ke tiga jenis kelompok garis-keras yang berkembang di Indonesia yang demokratis: *pertama*, kelompok main hakim sendiri, dan FPI adalah yang paling terkenal dalam kategori ini; *kedua*, kelompok advokasi di tingkat akar-rumpun, bisa diwakili oleh GARIS di Cianjur yang juga kerap menggunakan taktik kekerasan; dan *ketiga*, kelompok transformatif yang diwakili oleh Hizbut Tahrir, yang ingin menggantikan sistem demokratik di Indonesia dengan khilafah.

1. *Vigilantisme*

Aksi main hakim sendiri, dengan sendirinya, bertentangan dengan demokrasi. Lepas dari kelompok garis-keras, Indonesia memiliki angka kekerasan vigilante yang sangat tinggi. Untuk memberikan gambaran, kita dapat melihat data dari Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) yang sekarang dikelola Menkokesra. Kekerasan di Indonesia dibagi menjadi sepuluh kategori: sumber daya, administrasi, elektoral, separatis, dan sebagainya, tetapi kategori terakhir adalah “main hakim sendiri”. Jumlah insiden di sini begitu tinggi, sehingga dirasa perlu untuk membuat kategori khusus untuk itu.

Sebagian besar dari peristiwa ini adalah aksi penghakiman massa terhadap tersangka pencuri atau penjambret. Menurut SNPK, pada tahun 2012, 53 orang tewas dan 629 terluka di wilayah Jabotabek saja; Lampung memiliki tingkat tertinggi kedua dengan 18 tewas dan 135 luka-luka. Ini merupakan gejala kurangnya kepercayaan kepada sistem peradilan – banyak masyarakat memilih untuk mencari keadilan yang instan ketimbang menyerahkannya kepada polisi atau mengajukan kasus ke pengadilan di mana biayanya tinggi dan hasilnya belum tentu benar. Kelemahan sistem peradilan juga memungkinkan organisasi seperti FPI berkembang di mana-mana.

⁷ *Ibid.*

Bukan saja orang awam yang main hakim sendiri. Polisi dan militer sendiri terlibat dalam *summary justice*. Contohnya adalah kasus Cebongan pada Maret lalu, di mana aparat Kopassus menewaskan empat tahanan yang diduga membunuh teman mereka. Sudah cukup buruk bahwa hal itu terjadi, tapi lebih buruk lagi ketika kita mendengar ada pejabat senior yang membenarkan pembunuhan itu dalam kerangka *esprit de corps* dan semangat “Ksatria”.

Aksi main hakim sendiri bukanlah fenomena baru di Indonesia. Orde Baru memobilisasi preman dan geng pemuda untuk menyerang komunis – seperti yang diperlihatkan dalam film dokumenter “Act of Killing” – dan kemudian mensponsori mereka masuk ke organisasi seperti Pemuda Pancasila.⁸ Pada hari-hari awal *reformasi* kita melihat pembentukan *pamswakarsa* yang dibuat aparat keamanan dengan melibatkan kelompok-kelompok milisi dari kalangan preman dan kelompok Islam sebagai kekuatan penyeimbang terhadap gerakan mahasiswa. Di antara mereka adalah FPI.

Sudah banyak dokumentasi tentang bagaimana kelahiran FPI disponsori oleh aparat negara; juga tentang bagaimana kegiatannya mencari uang. Sebagaimana dicatat Ian Wilson, untuk sebagian anggota gerakan Islam militan, “mendapat akses ke sumber daya dan manfaat ekonomi sering lebih penting daripada komitmen ideologis.”⁹ Pada 2005, seorang anggota FPI mengatakan kepadanya bahwa nasionalisme dan gagasan “bela bangsa” sudah ketinggalan zaman; dan bahwa sekarang, pada era reformasi, kegiatan anti-kemaksiatan atas nama Islam jauh lebih seksi.¹⁰

Di banyak daerah, FPI mempertahankan kontak dekat dengan polisi, yang bisa menjelaskan keengganan polisi mengganggu aktivitas mereka. Tapi pola kegiatan mereka sangat bertentangan dengan demokrasi dan penerimaan peraturan. Seperti dijelaskan oleh salah satu pemimpinnya di Ciamis, organisasi memiliki prosedur rumit panjang sebelum akhirnya mereka menggunakan kekerasan. Setelah mendapatkan laporan baik dari unit intelijen sendiri atau dari masyarakat soal tempat maksiat atau gereja bermasalah atau aliran agama yang dianggap menyimpang, FPI mendekati target dan mengajak dialog untuk menghentikan aktivitas mereka. Jika mereka mengabaikan saran ini, FPI menulis surat ke pejabat setempat dengan

⁸ David Brown dan Ian Wilson, “Ethnicized Violence in Indonesia: Where Criminals and Fanatics Meet,” *Nationalism and Ethnic Politics*, Vol. 13, No. 3 (2007), hal. 373.

⁹ Ian Douglas Wilson, “As long as it’s halal: Islamic Preman in Jakarta,” dalam Greg Fealy and Sally White (eds.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008).

¹⁰ *Ibid.*, hal. 193.

tembusan kepada Camat dan Polsek, menginformasikan bahwa ada aktivitas ilegal di wilayah hukum mereka. Dalam suratnya itu, FPI mengingatkan tanggung jawab pejabat dan aparat untuk menindaknya. Biasanya ada tiga peringatan pada surat itu. Jika setelah peringatan ketiga tak ada hasil, FPI memobilisasi masyarakat setempat dan anggotanya untuk melakukan demonstrasi ke kantor pejabat setempat. Jika tuntutan ini tetap tak dipenuhi, barulah FPI melakukan aksi *sweeping* atau serangan.

Hampir dalam semua kasus aksi massa FPI menginformasikan pemerintah sebelumnya. Jadi tidak mungkin polisi bisa mengklaim bahwa mereka tidak tahu bentrokan akan terjadi.¹¹ Malah, dalam beberapa kasus, polisi bisa minta uang proteksi dari target – terutama jika itu adalah sebuah kasino atau rumah bordil – untuk menghindari konfrontasi.¹²

Selain menargetkan tempat hiburan, gereja-gereja dan komunitas Ahmadiyah, yang menjadi korban utama premanismenya, FPI juga membubarkan pertemuan internasional kaum gay dan lesbian, diskusi oleh feminis Muslim dari Kanada, Irshad Manji, di Salihara pada 2012, dan juga berusaha melarang kegiatan yang dianggap imoral seperti konser Lady Gaga dan kontes Miss World. Hanya ketika organisasi dan sekutunya melakukan aksi kekerasan yang dianggap telah berlebihan, barulah polisi bertindak. Seperti dalam insiden Monas pada 2008 atau aksi penusukan anggota HKBP Ciketing pada 2010. Tapi kalau pun ditangkap, seperti kita tahu, anggota FPI dituntut dan dihukum amat ringan, jauh di bawah hukum maksimum yang ada di KUHP. Artinya ada lampu hijau untuk berlanjut.

Tapi negara demokratis mana yang mengizinkan sebuah organisasi preman, atau organisasi masyarakat madani, menggunakan kekuatan yang seharusnya menjadi wewenang aparat keamanan? Pada 1998, FPI mungkin taat kepada instruksi aparat sebagai pamswakarsa. Namun, pada 2013, yang sering terjadi adalah sebaliknya: FPI menetapkan agenda, dengan mengklaim mewakili masyarakat, dan polisi – walaupun tidak selalu – hanya *stand by*, diam menonton. (Memang, seperti ditunjukkan penelitian Ihsan Ali-Fauzi dan teman-temannya, aksi massa bisa dicegah hanya kalau ada penda atau kapolsek yang berani.)¹³

¹¹ Wawancara Setara Institute dengan kepala FPI, Ciamis, 26 Oktober 2010.

¹² Wilson, *op. cit.*

¹³ Ihsan Ali-Fauzi, Samsu Rizal Panggabean dkk., *Kontroversi Gereja di Jakarta* (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-Cultural Studies, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2011).

FPI bisa saja menggunakan aksi main hakim sendiri yang merusak prinsip-prinsip demokrasi, tapi kelompok ini berbeda dari kelompok garis-keras lainnya karena secara ideologis FPI tak memiliki masalah dengan demokrasi. Mereka tidak memperjuangkan negara Islam. Bisa saja anggotanya mengejar sebuah jabatan di pemerintah atau sepanggung dengan para kandidat dalam pemilu lokal. Bahkan FPI sempat berpikir untuk mendaftar sebagai partai politik. Mereka mendukung Piagam Jakarta, tetapi secara umum jauh lebih santai tentang agama daripada banyak rekan-rekan garis-kerasnya yang lain – mungkin karena banyak di antaranya datang dari latar belakang yang sangat tradisional.

Menarik untuk mengkaji bagaimana organisasi ini bisa bertahan. Setelah mengalami masa penurunan pasca pimpinan FPI ditangkap pada 2002, FPI mendapat kesempatan untuk hidup kembali setelah tahun 2005 dan penerapan pilkada langsung – apalagi di wilayah Jawa Barat. Di daerah yang sangat konservatif ini, para politisi – terutama dari partai-partai sekular nasional seperti Golkar – melihat manfaat dan keuntungan dalam kerja sama dengan kelompok-kelompok Islam lokal seperti FPI untuk merencanakan acara kampanye atau untuk mendulang suara. Sebagai imbalannya, FPI sebagai sebuah kelompok advokasi bisa mendapatkan janji-janji kampanye yang sesuai dengan agenda mereka seperti untuk menutup kegiatan Ahmadiyah, misalnya, atau mencegah sebuah gereja tertentu yang sedang dibangun, atau meloloskan perda syariah. Misalnya kita melihat, pada 21 Februari 2013, ketika kampanye pilgub Jawa Barat akan berakhir, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, menandatangani perjanjian dengan FPI untuk sepenuhnya menerapkan peraturan anti-Ahmadiyah. Ini terjadi di daerah yang mengalami lebih banyak serangan kekerasan atas nama agama dibanding tempat-tempat lain di negara ini.¹⁴

Michael Buehler, yang telah melakukan penelitian yang luas tentang masalah ini, mencatat dalam sebuah artikel baru-baru ini, bahwa menjanjikan perda syariah atau program islami lainnya dapat memungkinkan politisi lokal untuk meningkatkan citra publik *vis à vis* lawan-lawan mereka.¹⁵ Di daerah seperti Ciamis, di mana FPI punya basis di dalam komunitas pesantren, organisasi dapat memainkan peran penting dalam membantu calon tanpa kredensial Islam tertentu untuk mendulang suara.

¹⁴ “Aher adalah masalah bagi Toleransi di Jawa Barat”, Setara Institute, 7 Mei 2013.

¹⁵ Michael Buehler, “Subnational Islamization through Secular Parties: Comparing Shari’a Policies in Two Provinces,” *Comparative Politics*, Vol. 46, No. 1 (Oktober 2013).

Dalam beberapa tahun terakhir, FPI juga telah mengambil peran lain: bertindak sebagai pasukan keamanan dalam konflik tanah. Dalam sebuah laporan kami mengenai sengketa antara petani singkong dengan perkebunan tanaman industri di Mesuji, Lampung, ditunjukkan bagaimana pensiunan jenderal Saurip Kadi – yang oleh pengagumnya dipanggil Hugo Chavez dari Indonesia – telah menyerukan para petani untuk menduduki areal konsesi perusahaan. Ketika mereka terancam penggusuran, Saurip membawa FPI sebagai pelindung, bukan karena dia setuju dengan berbagi pandangan Habib Rizieq atau memiliki simpati tertentu dengan taktik organisasi. Melainkan, itu karena, seperti diakuinya sendiri: “Ketika simbol-simbol agama yang terlibat, pemerintah cenderung akan mundur.” Itu komentar yang menyedihkan tentang keadaan demokrasi Indonesia.

Satu catatan terakhir: Ada rasa penasaran di kalangan gerakan radikal terhadap sikap FPI yang enggan menyerang kelompok Syiah. Ketika retorika anti-Syiah menguat di Indonesia terutama dari kelompok Salafy dan Salafy Jihadi, Habib Rizieq dipaksa bersikap defensif, bahkan sebagian kelompok menuding dirinya sebagai pro-Syiah. Tuduhan ini tidak akan mencegah FPI dari membangun aliansi dengan kelompok-kelompok lain ketika masalah besar berikutnya muncul, tapi untuk saat ini, Habib Rizieq tampaknya seperti dijauhi dan diasingkan. Satu dari banyak contoh bagaimana perbedaan antara kelompok garis-keras ini justru menghindari gerakan yang lebih besar.

2. *GARIS*

Contoh kedua dari kelompok masyarakat madani yang tindakannya kerap bertentangan dengan demokrasi adalah GARIS (Gerakan Reformis Islam), sebuah organisasi akar-rumput yang cukup kaya di Cianjur dan dipimpin oleh Haji Chep Hernawan. Seperti FPI, GARIS didirikan beberapa saat setelah reformasi 1998. Organisasi ini didirikan bukan sebagai pamswakarsa, tapi sebagai organisasi yang menjaga masyarakat dari berbagai penyakit sosial yang dikhawatirkan akan membawa pergolakan politik – termasuk, menurut Chep, kemungkinan kembalinya komunisme di Indonesia.

Chep melihat GARIS sebagai cara untuk mencoba untuk menerapkan hukum Islam, terutama melalui kegiatan anti-maksiat. Dalam hal ini, FPI adalah mitra. Dia mengatakan, untuk Jawa Barat, GARIS adalah ring satu dan FPI adalah ring dua, tetapi jika pasukan GARIS diperlukan untuk kegiatan FPI di Jakarta atau di tempat lain, anak buahnya siap membantu.¹⁶ Dia mengklaim bahwa GARIS beranggotakan 28.000 orang di Cianjur saja, dengan banyak lagi di seluruh Jawa Barat.

¹⁶ Wawancara dengan Chep Hernawan, Setara Institute, 2011.

Meskipun dia sempat jadi bendahara Partai Bulan Bintang selama bertahun-tahun, Chep melihat bahwa demokrasi secara fundamental bertentangan dengan Islam, karena mayoritas dapat memutuskan sebuah kebijakan (legalisasi prostitusi, misalnya), yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam sebuah wawancara 2011, dia mengatakan bahwa tiga ancaman terbesar bagi Jawa Barat adalah Jaringan Islam Liberal, HKBP, dan ateis-komunis. Dia berbicara dengan bangga bahwa GARIS bertanggungjawab untuk serangan-serangan terhadap komunitas Ahmadiyah di Cianjur pada tahun 2005, beberapa bulan setelah keluarnya fatwa MUI tentang sesatnya kelompok tersebut.¹⁷ Pada saat itu, 12 anggota GARIS ditangkap dan akhirnya dijatuhi hukuman enam bulan atas serangan yang meneror warga dan menyebabkan kehancuran 17 rumah.

Pelajaran yang ditarik oleh Chep Hernawan dari insiden tersebut menarik: Jika Anda akan membakar gedung-gedung, lebih baik Anda melakukannya malam hari, sehingga Anda tidak tertangkap.¹⁸ Dia melihat vandalisme sebagai sesuatu yang dibenarkan, dan penangkapan sebagai bagian dari perjuangan – dan dia hampir kebal dari hukum, sebagai seorang pengusaha terkemuka, tokoh masyarakat, politisi, dan ulama.

Pada 2011, dia menjadi berita utama ketika menceritakan bahwa beberapa pensiunan jenderal militer mendukung aksi anti-Ahmadiyah sebagai cara menjelekkan Presiden Yudhoyono. Hal ini juga menunjukkan bahwa beberapa organisasi ini juga digunakan oleh kepentingan politik luar, seperti Saurip Kadi juga memanfaatkan FPI.¹⁹

Di luar itu semua, GARIS adalah peserta reguler dalam koalisi kelompok-kelompok Islam sejenis, mulai dari Forum Umat Islam sampai Forum Anti Pemurtadan Bekasi. Memang ini salah satu karakteristik kelompok masyarakat madani Islam: mereka sering membentuk front advokasi di tingkat lokal, yang mengaku mewakili komunitas Muslim secara keseluruhan.

Dalam konteks yang sangat berbeda, jaringan advokasi diartikan sebagai “aktor yang memperjuangkan suatu hal, yang terikat oleh nilai yang sama, diskursus yang sama, serta penukaran informasi dan pelayanan secara intensif.”²⁰ Di Jawa, Sulawesi dan Sumatra, kita sedang melihat kelompok

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ “Retired Generals Using Islamic Groups in Attempt to Topple President – Report,” *The Jakarta Globe*, 22 March 2011.

²⁰ Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink memaparkan jaringan advokasi transnasional dalam karya mereka, “Transnational advocacy networks in international and regional politics,” UNESCO, 1999.

intoleran bergabung dengan beberapa “front” atau “forum” untuk meyakinkan atau menekan pemerintah agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jumlahnya cukup penting: seorang bupati atau kapolres pasti lebih cenderung menyegel sebuah gereja kalau kelompok yang menuntut itu mewakili 15 ormas daripada hanya satu. “Penukaran informasi secara intensif” difasilitasi via SMS dan media sosial, yang memungkinkan mobilisasi yang cukup besar tanpa perencanaan yang panjang. Aksi protes dan demo bisa membuktikan secara visual kepada para peserta bahwa mereka adalah bagian dari gerakan sosial, yang tujuannya benar. Koalisi Islamis dengan cara begini adalah alat penting untuk memperkuat solidaritas kelompok.²¹

3. *Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)*

Jika FPI dan kelompok sejenisnya sering melanggar hukum, walaupun mereka tak punya masalah dengan demokrasi, HTI, yang pada dasarnya anti-demokrasi, adalah kasus yang sangat berbeda. HTI adalah organisasi yang sangat hati-hati dengan batas-batas hukum. Mereka tidak menggunakan kekerasan, meskipun kadang-kadang mendukung orang lain yang melakukannya. Tujuannya bersifat revolusioner dan anti-demokrasi, dan salah satu cabang terbesar di dunia ada di Indonesia. Sejauh ini, benteng terkuat terhadap penyebaran pengaruh HTI adalah PKS – karena mereka menasar target dakwah yang sama, yaitu kaum elit terdidik. Satu pertanyaan menarik adalah apakah menurunnya popularitas PKS akibat skandal impor daging sapi dan isu-isu lainnya akan menguatkan penguatan HTI.

Hizbut Tahrir, yang berarti Partai Pembebasan dalam bahasa Arab, adalah sebuah organisasi internasional yang bekerja untuk pembangunan kembali kekhalifahan, sistem global dari pemerintahan Muslim yang terakhir ada di bawah kerajaan Usmani. Kelompok ini telah hadir setidaknya di 45 negara, dan di mana-mana memfokuskan upaya rekrutmen di kampus-kampus.

Mereka telah menetapkan tiga tahapan untuk meraih kekuasaan. Yang pertama adalah pembinaan (*tatsqif*), di mana mereka mengidentifikasi calon anggota. Yang kedua adalah berinteraksi dengan masyarakat (*tafa’ul*), di mana mereka memperkenalkan anggota komunitas Muslim dengan tujuan organisasi, dengan harapan mereka memberikan dukungan mereka. Yang ketiga adalah mengambil-alih kekuasaan (*istilamu al-hukmi*), di mana hal itu bertujuan untuk membangun jaringan pemerintah di bawah kekhalifahan baru.²² Hal ini mendorong anggotanya untuk mencari dukungan dari

²¹ Lihat Jesus Casquete, “The Power of Demonstrations,” *Journal of Social, Cultural and Political Protest*, Vol. 5, No. 1 (Mei 2006), hal. 45-60.

²² Mohamed Nawab Mohamed Osman, “The Transnational Network of Hizbut Tahrir Indonesia,” *Southeast Asia Research*, Vol. 18, No. 4 (Desember 2010), hal. 737.

kalangan pemerintah dan militer. Pada masa-masa awal organisasi, tahun 1960, aliansi ini menghasilkan serangkaian kudeta yang gagal di Yordania, Suriah dan Mesir. Pada akhir 1970-an, partai diperluas ke Amerika Serikat, Inggris dan Australia, dan cabang Indonesia didirikan melalui koneksi dengan anggota cabang Australia. Pusatnya berada di Bogor, di kampus IPB, di mana mereka mempertahankan kehadiran yang kuat sampai hari ini.

Dari tahun 1980-an hingga reformasi, kelompok ini adalah organisasi klandestin. Barulah pada tahun 2000 mereka menjadi organisasi terbuka dan relatif telah berkembang pesat sejak itu, meskipun persyaratan keanggotaan yang ketat menjadikan mereka sebuah organisasi elit yang kurang dikenal di masyarakat luas.²³

HTI membuat titik budi-daya pemimpin pemerintahan di tingkat lokal dan nasional, dan merekrut orang di akademi pemerintah seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Salah satu keberhasilan penting rekrutmen mereka adalah mantan menteri kesehatan, Siti Fadillah Supari, yang tur bukunya, yang mengklaim flu babi adalah buatan manusia, disponsori oleh HTI. Selain itu, kecurigaan terhadap laboratorium Barat dan perusahaan farmasi mencerminkan ekspose ajaran HTI. Dorongan dari ajaran-ajaran ini adalah bahwa Barat bertentangan dengan Islam, bahwa pemerintah Barat dan perusahaan multinasional berusaha melemahkan Islam dan mencuri sumber daya kaum Muslim.

Baru-baru ini HTI bergabung dengan Muhammadiyah dalam permohonan untuk mengakhiri BK Migas dengan alasan bahwa badan tersebut adalah alat kepentingan asing. HTI telah menjadi kekuatan yang mengganggu di banyak kampus karena mereka mencoba membatasi perdebatan dan bersikeras pada tema sendiri, yakni bahwa Barat dan kapitalisme adalah musuh. Tapi di samping isu-isu yang bersifat polemis, HTI juga pandai menggerakkan para simpatisan untuk melakukan demonstrasi jalanan, yang lebih ditujukan kepada orang awam – penolakan kenaikan subsidi BBM, misalnya. Pada umumnya, aksi macam ini selalu berlangsung baik: disiplin dan damai.

HTI juga sangat strategis dalam pendekatan mereka di Aceh dan Papua. Tsunami tahun 2004 memberikan peluang bagi banyak organisasi garis-keras untuk mengembangkan basis di Aceh, HTI tidak terkecuali, dimulai dengan kampus di Banda Aceh dan secara bertahap bergerak ke Lhokseumawe dan Aceh Tengah. Ketika di DPRA diadakan rapat dengar

²³ Suatu survei LSI pada tahun 2006 menunjukkan bahwa hanya 3 persen dari responden mengenal nama Hizbut Tahrir atau tahu tentang kegiatannya, padahal 18 persen yang tahu tentang FPI. Lihat di LSI, "Support for Radical Religious Attitudes and Behaviour," www.LSI.or.id/file_download/18.

pendapat tentang *qanun* (peraturan daerah Aceh) yang berkaitan dengan pelaksanaan syariah, HTI selalu hadir – sehingga, meskipun jumlahnya kecil, kehadiran mereka punya pengaruh signifikan terhadap perdebatan. Di Papua, HTI juga telah aktif bergerak melalui Jayapura di Papua dan melalui organisasi AFKN di Papua Barat. Bersama dengan organisasi-organisasi berbasis Jawa lainnya, HTI telah menyebarkan gagasan bahwa para misionaris Kristen telah mengkonversi Papua tidak dari kepercayaan penduduk asli, tapi dari Islam dan sekarang saatnya untuk membalik prosesnya.

Meskipun mengklaim bahwa minoritas akan dilindungi dalam kekhalifahan masa depan, HTI sangat tidak setuju dengan gagasan pluralisme, dan baru-baru ini memprotes pameran lintas-agama di UIN Syarif Hidayatullah dengan alasan bahwa hal itu sesat. Hizbut Tahrir mungkin menarik “the best and the brightest”, tetapi doktrinnya mempromosikan intoleransi.

HTI dan Forum Umat Islam, suatu koalisi yang dipimpin mantan DPP HTI Muhammad al-Khaththath, ahli memakai alat advokasi masyarakat madani. Jika FPI dan kelompok-kelompok seperti GARIS bisa diibaratkan sebagai otot gerakan Islamis, maka HTI dan FUI adalah otaknya – dan agenda keduanya jauh lebih luas dari hanya soal agama. Mereka tahu bagaimana mengajukan hal-hal politik dan sosial supaya menarik untuk masyarakat dan juga bagaimana mengangkat hal-hal yang hangat di akar-rumput. Mereka pandai membuat aliansi dengan kelompok arus utama (*mainstream*), seperti Muhammadiyah. Mereka bisa menentukan orang di dalam DPR atau birokrasi yang bersimpati dengan perubahan kebijakan yang mereka inginkan dan mendorong kebijakan itu dari dalam. Dan mereka memilih isu-isu dengan baik. Tapi mereka hanya bisa menang jika pelawanan dari pemerintah lemah. Jika ada kemauan politik dari pusat yang kuat, mereka selalu kalah: suatu pelajaran penting untuk capres tahun depan.

Masyarakat Madani dan Intoleransi

Satu pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah organisasi masyarakat madani seperti ini mencerminkan sikap yang lebih luas dalam masyarakat atau justru mencoba untuk membentuk sikap tersebut. Jawabannya sangat penting, karena jika Indonesia sebagai masyarakat makin intoleran, maka tugas melestarikan pluralisme dan melindungi kaum minoritas akan lebih sulit (tapi mungkin lebih mendesak). Jika organisasi ini tidak mewakili kecenderungan sosial yang lebih luas, maka tanggungjawab pemerintah untuk melindungi kaum minoritas seharusnya menjadi lebih mudah.

Data yang ada di survei bersifat ambigu. Dalam studi Pew Foundation tentang Islam global, Indonesia muncul sebagai salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim yang paling terbuka. Meski begitu, masih 72 persen Muslim Indonesia yang disurvei mendukung formalisasi hukum Islam. Hasil ini membuat dukungan untuk syariah di Indonesia sedikit lebih lemah dari Mesir (sebelum *Arab Spring*) dan sedikit lebih kuat dari Tunisia.²⁴ Sekitar 21 persen melihat Kristen sebagai memusuhi (*hostile*) Islam dan 16 persen melihat Muslim sebagai memusuhi orang-orang Kristen. Angka ini sedikit lebih rendah dari ketegangan antar-agama di Malaysia, dan jauh lebih baik daripada Mesir di mana di atas 50 persen dari mereka melihat Kristen sebagai musuh. Indonesia menempati salah satu tingkat terendah dari semua negara dalam penerimaan terhadap pernikahan antar-agama (pertanyaannya adalah apakah responden akan merasa nyaman jika putra atau putri mereka menikah dengan seorang Kristen).²⁵ Pada saat yang sama, 53 persen orang Indonesia khawatir terhadap ekstremisme dalam komunitas Muslim, dibandingkan, misalnya, dengan hanya 8 persen orang Malaysia atau 22 persen orang Palestina. Ini berarti bahwa kaum Muslim Indonesia pada umumnya melihat toleransi sebagai sesuatu yang baik.

Survei-survei yang dilakukan di Indonesia rupanya menunjukkan pengerasan sikap. Survei oleh Lembaga Survei Indonesia dan PPIM tahun 2006-2008 memberikan petunjuk pertama bahwa Indonesia tidak setoleran sebagai citra diri sendiri. Pada tahun 2011, sebuah survei LAKIP menjadi berita hangat dengan menunjukkan bahwa 49 persen dari siswa SMP-SMA yang disurvei mendukung kegiatan radikal atas nama agama. Survei tersebut ditujukan kepada guru Pendidikan Agama Islam dan siswa mereka dan dilakukan di wilayah metropolitan Jakarta dan sekitarnya antara Oktober 2010 dan Januari 2011. Sekitar 42 persen guru dan 52 persen siswa mendukung penyegelan dan perusakan terhadap rumah-rumah ibadah yang tidak sah. Sekitar 38 persen dari guru-guru dan lebih dari 68 persen dari siswa mendukung perusakan rumah atau fasilitas anggota aliran sesat. Sebuah persentase yang lebih rendah mengatakan bahwa mereka siap untuk mengambil bagian dalam aksi-aksi kekerasan itu sendiri.²⁶ Secara umum, survei menemukan bahwa guru-guru agama pada umumnya kurang toleran dibandingkan siswa mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang

²⁴ Pew Foundation, Pew Foundation, *The World's Muslims: Politics, Faith, Society*, New York, 2013.

²⁵ *Ibid.* Hanya 6 persen Muslim Indonesia mengatakan bahwa mereka akan merasa nyaman jika putra mereka menikahi seorang Kristen, dibandingkan dengan 14 persen warga Bangladesh dan Palestina, 16 persen orang Malaysia, dan 30 persen warga Tunisia.

²⁶ "Ini dia Hasil Survei LAKIP Yang menghebohkan itu," detik.com, 28 April 2011. Mereka yang disurvei adalah 590 guru dan 997 siswa SMP dan SMA di sekitar Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.

bagaimana guru agama dilatih dan oleh siapa, dan bagaimana toleransi dapat diajarkan jika ada pengaruh kuat sebaliknya.

Akhirnya, kita dapat mengutip survei CSIS yang dilakukan di 23 provinsi pada tahun 2012 yang menunjukkan bahwa proporsi yang signifikan dari Indonesia, meskipun masih minoritas, tidak nyaman terlalu dekat dengan pemeluk agama lain. Seperti dilaporkan secara luas oleh Phillips Vermonte, direktur risetnya, sekitar 60 persen mengatakan mereka akan tidak punya masalah tinggal di sebelah orang dari agama lain, sementara lebih dari 33 persen menyatakan ketidaknyamanan. Lebih dari 68 persen tidak ingin rumah ibadah selain agamanya dibangun di komunitas mereka. Penolakan hampir sama tinggi di antara mereka yang berpendidikan tinggi dan mereka yang berhenti sampai SMP.²⁷ Dari satu segi, keputusan bersama menteri mendirikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dirancang untuk mengatasi masalah ini, tapi di beberapa daerah FKUB sendiri menjadi halangan.

Suatu hal yang juga penting untuk dicatat adalah intoleransi yang sangat terlokalisir: Jawa Barat secara rutin muncul dalam penelitian sebagai salah satu daerah yang paling tidak toleran di Indonesia, tempat di mana lebih banyak serangan agama terjadi dibanding di tempat-tempat lain. Ini juga provinsi yang telah menghasilkan perda syariah lebih banyak dari provinsi mana pun. Tapi di Jawa Barat pun potretnya tidak seragam. Cianjur dan Tasikmalaya, misalnya, telah mengalami kasus kekerasan vigilante jauh lebih banyak daripada Subang.

Penyebab Intoleransi

Banyak orang melihat bahwa meningkatnya intoleransi berasal dari peningkatan kesalehan dan konservatisme di kalangan masyarakat Indonesia. Tapi itu mengabaikan faktor-faktor lain yang mungkin juga berpengaruh. Di Bekasi, ada yang bilang bahwa tawuran antara kelompok Islam dan HKBP lebih berkaitan dengan persaingan ekonomi antara pendatang dari Batak dan orang setempat. Sama seperti di Poso, asal-usul konflik pada Desember 1998 lebih berkaitan dengan perubahan politik dan ekonomi daripada agama. Saya juga melihat kampanye sengaja yang sifatnya menyudutkan minoritas. Bagi siapa pun yang telah tinggal di Indonesia untuk waktu yang lama, peningkatan retorika anti-Syiah secara tiba-tiba adalah sesuatu yang mengejutkan. Walaupun benar bahwa MUI pada tahun 1984 sudah mengeluarkan pernyataan yang merekomendasikan kewaspadaan terhadap Syiah, sebuah refleksi dari kepedulian pemerintah Suharto terhadap

²⁷ "Survei: Toleransi Beragama Orang Indonesia Rendah" www.tempo.co, 5 Juni 2012.

dampak politik Revolusi Iran, hal itu tidak disertai dengan perlakuan yang bersifat diskriminatif, apalagi kekerasan, terhadap kelompok Syiah.

Kali ini, tiga faktor telah muncul bersama-sama: ledakan tulisan anti-Syiah dari komunitas salafi pro-Arab Saudi; sebuah peristiwa kekerasan di Madura yang dimulai pada 2011, yang tampaknya memiliki asal-usul yang sama sekali lokal; dan, baru-baru ini, konflik Suriah, yang telah memicu sentimen anti-Syiah dalam komunitas Sunni garis-keras. Sekarang sentimen anti-Syiah makin populer, kadang-kadang didorong oleh MUI setempat dan tokoh pemerintah.

Pada April 2012, sebuah kelompok masyarakat madani terkemuka di Bandung, Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), yang *nota bene* adalah organisasi yang mengeluarkan fatwa mati terhadap Ulil Abshar Abdalla pada akhir 2002, mengadakan diskusi yang bertajuk “Merumuskan Langkah Strategis untuk Menyikapi Penyesatan dan Penghinaan Para Penganut Syiah.” Pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa Syiah sesat dan bisa tidak dianggap Muslim sejati. Terlihat sebagai tamu pada diskusi tersebut antara lain Gubernur Jawa Barat dan Walikota Bandung.²⁸

Sentimen anti-Syiah kemudian diperkuat oleh Menteri Agama, Suryadarma Ali. Alih-alih mencoba meredam retorika yang membahayakan sebuah minoritas penting di Indonesia, seorang menteri senior justru mengipas-ngipas apinya. Dan tragisnya, tak lama sesudah itu, pada bulan Agustus, dia dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Yudhoyono!

Solusinya?

Paparan ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa intoleransi adalah ancaman terhadap demokrasi. Masalahnya, apa solusinya? Beberapa negara demokratis di Eropa, yang dihadapkan pada masalah kekerasan antar-etnis dan antar-agama, telah merespon dengan berbagai tindakan, baik legal maupun sosial. Salah satu yang sering diterapkan adalah undang-undang tentang kejahatan dan ekspresi kebencian (“*hate crimes*” dan “*hate speech*”). Kalau diterapkan di Indonesia, apakah akan ada gunanya? Saya tidak yakin.

Dalam demokrasi Barat, undang-undang kejahatan mulai dari kejahatan biasa – perusakan, pembakaran, penyerangan – dan kemudian menjatuhkan hukuman tambahan untuk ekspresi kebencian rasis atau agama di

²⁸ Lihat “Pemerintah akan mengawasi gerakan anti-Syiah,” dalam <http://www.syiah.co/viewtopic.php?id=38>

baliknya. Sebuah kejahatan yang mungkin dihukum dengan dua tahun penjara, misalnya, bisa dihukumi dengan empat tahun, jika jaksa dapat membuktikan bahwa kejahatan itu dipicu oleh kebencian.²⁹ Ketika kita melihat hukuman ringan yang dijatuhkan kepada kejahatan kebencian di Indonesia – tiga hingga enam bulan untuk pelaku pembunuhan tiga orang Ahmadiyah di Cikeusik atau enam bulan untuk orang-orang yang membakar 17 rumah Ahmadiyah di Cianjur – kemungkinan hukuman tambahan cukup menarik. Tapi, di sini mungkin tidak seperti di negara-negara lain: selalu ada kesempatan bahwa hukuman yang lebih berat akan diarahkan kepada para korban.

Salah satu versi RUU Kerukunan Umat Beragama Agama beberapa tahun yang lalu memang mengandung hukuman tambahan untuk kejahatan yang dilakukan atas nama agama. Tapi ada banyak pasal lain di draf tersebut yang memprihatinkan dan akhirnya tidak diajukan untuk diperdebatkan, walaupun tetap masuk prolegnas.

Walaupun undang-undang baru mungkin tidak merupakan solusi untuk Indonesia, saya tetap yakin bahwa titik awal untuk mengatasi intoleransi agama adalah kebijakan “*zero tolerance*” untuk kekerasan apa pun, betapa pun kecilnya. Ini adalah langkah minimal. Setiap tindakan intimidasi, ancaman, perusakan, pembakaran, atau kejahatan serupa yang dilakukan atas nama agama harus dihukum dengan hukuman maksimal. Baru-baru ini, seorang pemimpin FPI di Bandung dijatuhi hukuman 3,5 bulan, di bawah pasal 170 KUHP, karena memecahkan jendela di sebuah masjid Ahmadiyah. Hukuman maksimal seharusnya lima setengah tahun. Seperti Chep Hernawan yang melihat beberapa bulan dipenjara yang diberikan para pengikutnya sebagai hanya “sebagian dari perjuangan”, hukuman ringan tidak akan membawa efek jera (*deterrent*) apa pun, malah mejadi semacam prestasi. Pesan yang dikirim adalah bahwa kekerasan dapat diterima.

Sebuah analogi yang mungkin bisa dipikirkan lebih jauh adalah strategi “jendela pecah” yang diterapkan oleh polisi New York City dalam upaya menurunkan angka kejahatan di sana. Menurut teori ini, jika kejahatan relatif kecil ditangani secara agresif, kejahatan yang lebih serius bisa dicegah.³⁰ Jika untuk kepentingan mempromosikan toleransi dan mengurangi kejahatan main hakim sendiri, dalam hal ini terhadap kelompok minoritas, jaksa dan

²⁹ Erik Bleich, “The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in Liberal Democracies,” *Journal of Ethnic and Migration Studies*, Vol. 37, No. 6, hal. 917-934.

³⁰ “What Reduced Crime in New York City,” <http://www.nber.org/digest/jan03/w9061.html>.

hakim diarahkan untuk menjatuhkan hukuman yang maksimal, bukan minimum, terhadap pelanggar, maka mungkin dampaknya bisa kelihatan.

Tapi hukuman yang lebih berat tidak akan ada artinya jika pemerintah di tingkat nasional dan lokal selalu menyerah kepada radikalisme agama. Sungguh luar biasa, bagi saya sebagai orang luar, bahwa pejabat di pemerintah dapat mendukung organisasi seperti FPI tanpa sanksi apa pun. Bagaimana pemerintah bisa mengatakan kepada Dewan HAM PBB bahwa mereka telah “tanpa lelah mempromosikan kerukunan beragama dan toleransi” ketika para menteri secara terbuka merangkul vigilante seperti FPI sebagai mitra?³¹ Jauh lebih meyakinkan sebagai komitmen toleransi kalau ada inpres atau keppres yang secara resmi melarang pejabat untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok yang menyebarkan kebencian agama atau yang telah dikaitkan dengan kekerasan dengan cara apa pun. Bagi saya, Menteri Agama RI yang membuka perayaan ulang tahun FPI adalah sama saja dengan Gubernur Florida yang menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Terry Jones.

Demikian juga, ketika polisi di tingkat apa pun bekerjasama dengan kelompok-kelompok vigilante pada razia anti-maksiat atau aksi menyegel gereja-gereja atau masjid Ahmadiyah, tidak ada gunanya memikirkan undang-undang kerukunan agama. Pesan yang terkirim justru sebaliknya: kegiatan intoleransi didukung oleh negara. Kita sekarang punya Kapolri yang baru. Alangkah baik kalau beliau mengumumkan era baru dengan secara tegas melarang semua Polres dan Polsek untuk bekerja bersama ormas apa pun dalam pelaksanaan razia terhadap rumah ibadah. Selama kerjasama semacam ini terus berlanjut, apakah dengan FPI atau kelompok “main hakim sendiri” lainnya, maka akibatnya adalah makin menjamurnya mereka yang memaki-maki nilai-nilai toleransi.

Apakah Pancasila bisa menjadi solusi? Saya tidak tahu. Setiap malam sebelum tidur, saya mendengarkan Radio ElShinta, dan setiap malam, berulang kali, saya mendengar Pancasila dibacakan oleh anak-anak kecil. Seolah-olah radio berasumsi bahwa semakin sering Pancasila dibaca, semakin kuat nilai-nilai akan ditanam di otak dan tindakan.

Tapi tampaknya juga ada asumsi yang lebih luas beredar, terutama di kalangan orang Indonesia yang lebih tua, bahwa jika ajaran Pancasila dapat dibawa kembali seperti dulu di masa Orde Baru, maka pengajaran yang lebih

³¹ Kutipan dari Majelis Umum PBB, “National Report Submitted in Accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council Resolution 16/21, Indonesia,” A/HRC/WG.6/13/IDN/1, 7 Maret 2012.

eksklusif seperti dipromosikan Hizbut Tahrir atau FUI akan dinetralisir. Sejauhmana ini benar?

Ada beberapa masalah dengan asumsi ini. *Pertama*, Pancasila “berhasil” di masa Orde Baru karena di baliknya ada mesin yang represif. Tidak seorang pun ingin mesin itu kembali bekerja. Kita tidak ingin orang ditangkap karena merongrong Pancasila, apalagi melihat kebijakan seperti azas tunggal kembali. Belum pasti juga bahwa menambah jam pendidikan Pancasila akan menghalangi Hizbut Tahrir dari menyebarkan teori konspirasi atau Chep Hernawan untuk menggerakkan anah buahnya untuk menyerang gereja.

Kedua, Indonesia di bawah Orde Baru bukanlah surga pluralis seperti kadang-kadang digambarkan. Kita hanya harus melihat kembali perlakuan terhadap etnis Tionghoa untuk memahami bahwa toleransi saat itu adalah sesuatu yang berlangsung selektif. Dan Indonesia pada akhir tahun 2013 adalah tempat yang sangat berbeda dengan Indonesia zaman Orde Baru. Kita harus cari metode baru untuk mengajar toleransi dalam negara yang dinamis dan bebas, tanpa mengurangi hak-hak politik dan sipil yang begitu penting.

Penutup: 2014, Tahun Pemilu!

Jika kita mencari kemungkinan solusi atas masalah di atas, di samping *zero tolerance* terhadap kekerasan, harus diperhatikan betul unsur kepemimpinan. Ketika pemerintah Jakarta menunjuk Susan sebagai lurah di Lenteng Agung, lalu dengan penuh semangat membela pengangkatannya, FPI dan teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa – dan akhirnya tampaknya telah menyerah. Yang mengalahkan mereka adalah dukungan yang kuat oleh Jokowi dan Ahok. Mungkin dengan walikota baru Bogor kita akan melihat persoalan Gereja Yasmin akhirnya diselesaikan.

Hal ini membawa kita pada pemilu tahun depan. Seorang presiden baru, dikombinasikan dengan seorang kepala polisi yang baru, memiliki kesempatan untuk membuat kebijakan baru yang berarti.

Calon-calon presiden perlu mengeluarkan kode etik bagi penasihat dan staf mereka, di mana mereka dilarang mutlak untuk mendukung, walaupun secara simbolis, kelompok yang menyebarkan kebencian. Itu berarti bahwa mereka tidak bisa hadir pada pembukaan kongres atau perayaan ulang tahun kelompok yang bersangkutan. Mereka juga harus mengumumkan rencana mereka yang konkret untuk mempromosikan toleransi beragama dan menolak ekstremisme.

Ini harus mencakup komitmen untuk bekerjasama dengan polisi, jaksa dan hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimal untuk kejahatan kebencian, dengan menggunakan KUHP yang ada. Hal ini juga harus mencakup program untuk meninjau dan mengevaluasi program pelatihan untuk guru-guru agama – semua guru agama – untuk memastikan bahwa ajaran agama tidak menjadi kendaraan untuk mengajarkan intoleransi. Dan akhirnya, itu juga harus mencakup komitmen untuk memastikan bahwa semua orang yang diangkat sebagai anggota Kabinet punya komitmen yang terbukti untuk toleransi, khususnya di Kementerian Agama.

Cak Nur, kami membutuhkanmu sekarang.***